

Analisis Keterlibatan Pegawai Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Menghasilkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone

Syafridayani^{1✉}, Mustadir², Isma Safitri³
email korespondensi✉: syafridayaniria@gmail.com
^{1✉,2,3} STIE YAPI Bone, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pegawai dalam penyusunan laporan keuangan serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan transkripsi, reduksi, koding, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai yang terlibat aktif menunjukkan pemahaman lebih baik terhadap prosedur akuntansi, ketelitian dalam pencatatan transaksi, serta tanggung jawab dalam penyusunan laporan. Kendala yang dihadapi meliputi beban kerja tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antarbagian. Penelitian merekomendasikan pelatihan teknis berkelanjutan, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan peran pimpinan dalam membangun budaya kerja kolaboratif guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci: *keterlibatan pegawai, laporan keuangan, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas, sektor publik*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu instansi pemerintah secara andal dan dapat dipercaya. Informasi tersebut disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah pusat, dan DPRD atas penggunaan anggaran. Di Indonesia, setiap instansi pemerintah daerah, termasuk dinas lingkungan hidup kabupaten Bone, memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan di dinas lingkungan hidup kabupaten Bone masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesalahan dalam pencatatan dan pembukuan, yang dapat berupa ketidaksesuaian antara bukti transaksi dan pencatatan, keterlambatan input data, kesalahan klasifikasi akun, hingga kelalaian dalam mengarsipkan dokumen pendukung. Permasalahan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis

Pegawai terhadap sistem pencatatan berbasis akrual serta keterbatasan pelatihan. Menurut Kurniasih dan Herawaty (2021), penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan akan membantu entitas pemerintah dalam menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel. Hal

ini sejalan dengan pendapat haryanto (2021) yang menyatakan bahwa akurasi dalam pencatatan merupakan pondasi utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Keterlibatan pegawai yang optimal dalam proses pencatatan dan pembukuan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan. Ketika pegawai memahami secara langsung proses pencatatan, mereka akan lebih teliti dalam memeriksa kesesuaian data, lebih disiplin dalam pengelolaan dokumen, dan lebih cepat dalam menindaklanjuti koreksi apabila ditemukan kekeliruan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (rini, 2020). Oleh karena itu, keterlibatan pegawai dalam pencatatan dan pembukuan merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Meskipun isu kesalahan dalam pencatatan dan pembukuan keuangan merupakan permasalahan yang krusial, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana keterlibatan pegawai dapat berkontribusi dalam mencegah kesalahan tersebut, khususnya pada instansi pemerintah daerah seperti dinas lingkungan hidup kabupaten Bone. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pengalaman, proses, dan pandangan pegawai terhadap keterlibatan mereka dalam pencatatan dan pembukuan keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam bagaimana keterlibatan pegawai dalam pencatatan dan pembukuan keuangan dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara kontekstual dan holistik praktik pelaporan keuangan yang dijalankan oleh pegawai di lapangan (creswell, 2016; moleong, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pegawai dalam proses pencatatan dan pembukuan keuangan, serta bagaimana keterlibatan tersebut dapat mencegah kesalahan dan mendukung kualitas laporan keuangan di dinas lingkungan hidup kabupaten Bone. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di lingkungan pemerintah daerah. Menurut (mahmudi, 2019), akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang hanya dapat dicapai melalui sistem yang partisipatif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan: Kepala Dinas, PPK, Bendahara, Kassubag Keuangan, Kassubag Perencanaan/Program, serta staf keuangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan:

1. Transkripsi data hasil wawancara
2. Reduksi data untuk memilah informasi penting
3. Koding data dengan memberi label sesuai tema

4. Penyajian data dalam bentuk deskriptif naratif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tidak hanya terbatas pada unit keuangan, melainkan juga melibatkan berbagai unit kerja lainnya. Proses dimulai dari pencatatan transaksi harian oleh bendahara pengeluaran, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti pendukung dari setiap bidang teknis, kemudian diverifikasi oleh staf keuangan dan kasubbag keuangan, hingga tahap akhir penyusunan laporan yang disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kepala dinas. Pola kerja ini menggambarkan bahwa penyusunan laporan keuangan bersifat kolektif, bukan pekerjaan individual, sehingga dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Tingkat keterlibatan pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, kompetensi teknis pegawai dalam memahami sistem akuntansi berbasis akrual. Pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi lebih mampu melakukan pencatatan secara sistematis dibandingkan dengan pegawai non-akuntansi. Kedua, pengalaman kerja yang memengaruhi ketelitian dan kecepatan dalam memproses data. Ketiga, kepemimpinan yang suportif, terutama dari kepala dinas dan kasubbag keuangan yang berperan dalam memberikan arahan, mengawasi, serta memastikan setiap bagian menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Keempat, koordinasi lintas unit yang baik membuat alur kerja lebih efisien karena setiap bagian memahami perannya dalam mendukung penyusunan laporan. Temuan ini sesuai dengan teori kinerja pegawai, yang menegaskan bahwa partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab setiap pegawai menjadi penentu utama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas keterlibatan pegawai. Pertama, keterbatasan pemahaman teknis sebagian pegawai, terutama yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, menyebabkan kesalahan input data maupun keterlambatan dalam penyusunan laporan. Kedua, masalah teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil serta gangguan aplikasi keuangan sering menghambat proses pelaporan, khususnya pada masa akhir periode akuntansi. Ketiga, beban kerja pegawai yang tinggi membuat tingkat konsentrasi menurun sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administratif.

Menghadapi kendala tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Upaya yang ditempuh antara lain pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi data secara rutin untuk memastikan kesesuaian informasi keuangan antarunit, serta evaluasi dan pengawasan

berlapis oleh pimpinan. Strategi ini konsisten dengan teori pengelolaan keuangan, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Dari sisi kualitas, keterlibatan pegawai terbukti memberikan dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan oleh DLH Bone telah memenuhi kriteria laporan keuangan berkualitas menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan tepat waktu. Relevansi ditunjukkan oleh laporan yang mampu merefleksikan kondisi keuangan organisasi secara akurat. Keandalan tercermin dari penyajian data yang didukung bukti transaksi yang sah dan diverifikasi secara berlapis. Keterpahaman dapat dilihat dari konsistensi format laporan yang sesuai standar sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Keterbandingan tercermin dari konsistensi penyajian laporan antarperiode, sedangkan ketepatan waktu menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam proses penyusunan laporan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan kesesuaian dengan beberapa studi terdahulu. Penelitian Rini (2020) menemukan bahwa keterlibatan pegawai dalam penyusunan laporan keuangan daerah di Kabupaten Sleman meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pelaporan. Sementara itu, Putri & Hidayat (2021) di Kota Bandung menegaskan bahwa partisipasi pegawai berhubungan erat dengan peningkatan tanggung jawab dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mendukung temuan sebelumnya, tetapi juga menegaskan bahwa keterlibatan pegawai memiliki peran strategis dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan di sektor publik.

Dari sudut pandang teori, hasil penelitian ini memperkuat teori akuntansi dan teori laporan keuangan berkualitas, yang menyatakan bahwa kualitas informasi keuangan ditentukan oleh relevansi, keandalan, dan keterlibatan sumber daya manusia dalam proses penyusunan. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan teori kinerja pegawai, bahwa keterlibatan aktif, partisipasi, serta koordinasi antarunit menjadi faktor penting dalam mencapai efektivitas kerja organisasi. Secara konseptual, hal ini menegaskan bahwa keterlibatan pegawai bukan sekadar faktor administratif, tetapi merupakan variabel strategis yang menentukan keberhasilan tata kelola keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana pegawai dilibatkan dalam setiap tahap penyusunannya. Keterlibatan yang optimal akan meningkatkan akurasi, mempercepat proses, mengurangi kesalahan, serta memperkuat akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas pegawai,

memperbaiki sistem teknologi pendukung, serta mendorong koordinasi lintas unit agar keterlibatan pegawai dapat semakin efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Tabel

Tabel 1 Informan Penelitian

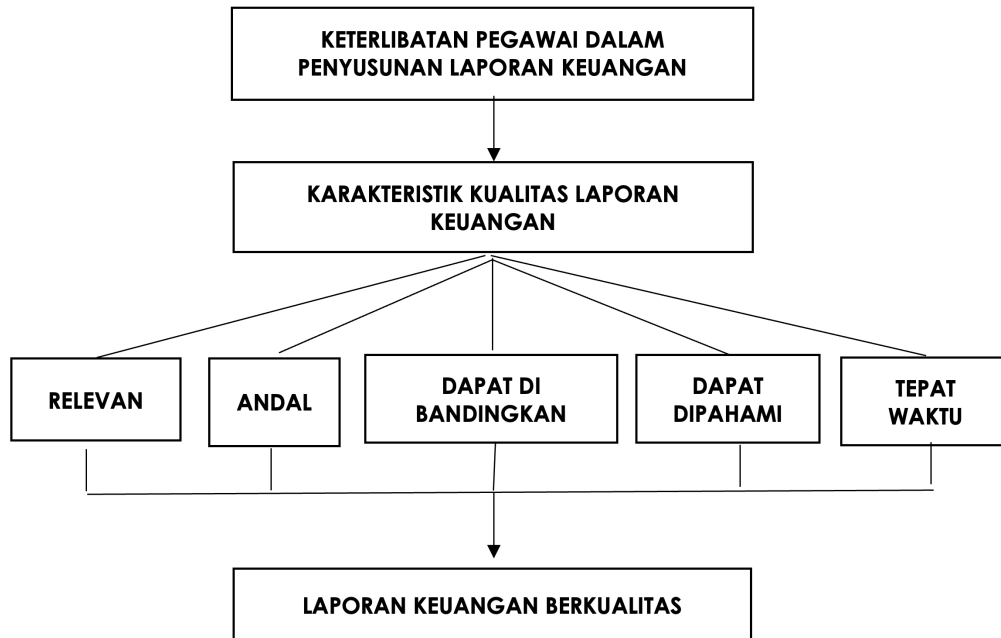
No	Kode	Nama	Jabatan	Peran dalam Pelaporan
1	IN1	Hasniwati, S.Pd	Kepala Sub bagian Keuangan dan TU	Koordinator penyusunan dan pengolahan laporan keuangan
2	IN2	Andi Rahmat Mursyah, S.STP.,M.H	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Validasi SPJ, Koordinasi Antar Bidang
3	IN3	Jumardi,S.Sos	Bendahara Pengeluaran	Mencatat Transaksi keuangan, menyusun SPJ
4	IN4	Hadija, S.E	Staf Keuangan	Input dan rekap data, bantu proses pelaporan
5	IN5	Dray Vibrianto, S.IP., M.H	Kepala Dinas	Pembina, pengarah, dan evaluator proses pelaporan.

Tabel 2 Triangulasi DLH Kabupaten Bone

No	Sumber data	Temuan wawancara	Data pendukung (observasi/ dokumentasi)	Kesimpulan
1	Kepala dinas (in5)	Menyatakan bahwa keterlibatan seluruh pegawai dalam pelaporan sangat penting dan telah di atur melalui penugasan langsung dan pengarah rutin dalam rapat dinas.	Notulen rapat koordinasi keuangan yang menunjukkan pengarah langsung pimpinan dan pembagian tugas pelaporan.	Arahan pimpinan menjadi landasan utama keterlibatan lintas bidang dan mendorong terciptanya budaya kerja kolaboratif dan akuntabel.
2	Kassubag keuangan (in1)	Menjelaskan bahwa semua bidang wajib	Sk penugasan pelaporan keuangan yang	Menunjukkan adanya pelibatan

		menyerahkan dokumen realisasi rutin dan pelaporan dikoordinasi lintas unit melalui sop dan jadwal internal.	menetapkan peran kassubag dan tim dalam proses pelaporan.	formal dalam pelaporan, serta pembagian peran yang mempercepat proses dan menjaga akurasi.
3	Pejabat penatausaha keuangan (in2)	Menyebutkan bahwa penyusunan laporan sangat bergantung pada kerja sama dengan bendahara dan staf tekins, termasuk dalam proses verifikasi dan penyesuaian data SPJ.	Berita acara rekonsiliasi kas antara PPK dan bendahara sebagai bukti validasi kas dan transaksi secara berkala.	Kegiatan verifikasi silang menjadi kunci untuk menghindari kesalahan pelaporan dan membangun keandalan data keuangan.
4	Bendahara pengeluaran (in3)	Mengakui bahwa kesalahan dan selisih kas bisa diminimalkan melalui rekonsiliasi berkala bersama PPK dan staf terutama menjelang pelaporan bulanan dan tahunan.	Form rekonsiliasi kas yang digunakan secara rutin menjelang pelaporan bulanan atau tahunan.	Kolaborasi teknis internal memperkuat sistem kontrol dan mencegah selisih antara saldo fisik dan saldo buku.
5	Staf keuangan (1n4)	Menyampaikan bahwa keterlibatan mereka tidak hanya sebatas input data, tetapi juga mencakup pengecekan dokumen, koordinasi dengan bidang, dan validasi kelengkapan.	Contoh SPJ kegiatan yang di susun bersama staf dan bidang teknis, memuat nota, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.	Validasi terhadap dokumen pelaporan dilakukan berlapis, memperkuat kelengkapan dan transparansi dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Gambar



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Simpulan Penelitian

Keterlibatan yang menyeluruh ini memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan dapat diselesaikan tepat waktu, lebih akurat, serta dilengkapi dokumen pendukung yang memadai. Selain itu, keterlibatan lintas bidang juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena proses pelaporan dapat diawasi dan dikonfirmasi oleh lebih banyak pihak. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelibatan pegawai, seperti keterbatasan pemahaman terhadap sistem akuntansi berbasis akrual, kendala teknis seperti gangguan sistem dan lambatnya jaringan internet, serta potensi kesalahan dalam input data. Kendala-kendala ini berpotensi mempengaruhi kualitas laporan apabila tidak segera diatasi. DLH kabupaten Bone mengatasi hal ini dengan melakukan rekonsiliasi rutin, pelatihan teknis, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, keterlibatan pegawai terbukti menjadi faktor strategis dalam menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan publik yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

- Busro, M. (2020). *Teori kinerja pegawai*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, I. (2021). *Teori akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, N. (2020). *Akuntansi sektor publik: Teori dan praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar akuntansi keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniasih, D., & Herawaty, A. (2021). Penyusunan laporan keuangan berbasis SAP untuk transparansi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(2), 55–68.
- Kurniawan, A., & Sudrajat, T. (2021). Pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 44–59.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, A. D., & Hidayat, R. (2021). Partisipasi pegawai dalam penyusunan laporan keuangan dan dampaknya terhadap kualitas data. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 23–34.
- Rini, L. D. (2020). Keterlibatan pegawai dan pengaruhnya terhadap akurasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(3), 112–121.